

PKB Dalam Konstruksi Media Massa: Antara Teks, Konteks, dan Realitas

Oleh I Nyoman Wija, SE,AK *

Pers dan kebudayaan bagaikan mata pisau, yang menjadi “bencana” bagi kehidupan publik dan perilaku masyarakat, karena mampu mendorong perubahan menuju keseimbangan kekuasaan, kearifan dan keunggulan lokal atau daerah. Di samping itu, secara politis termasuk sangat cukup berkorelasi dengan kekuasaan, karena bisa mempengaruhi kreativitas politik masyarakat terhadap perubahan orientasi, strategi, dan kebijakan politik. Sehingga, pers dan kebudayaan seringkali dimanfaatkan berbagai pihak baik negara maupun kelompok di tengah masyarakat untuk kepentingan berbeda-beda.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, di singkat Orba yang berlangsung sejak 1968 hingga 1998 pers dengan media massa cetak maupun elektronik, dan kebudayaan dengan elemen seni, etnis dan agama seringkali dimanfaatkan sebagai pola strategis dalam mengkonstruksi legitimasi publik demi mencapai tujuan memenangkan persaingan di antara kelompok masyarakat untuk menandingi kekuatan negara. Sehingga, keberadaan pers dan kebudayaan seakan setali tiga uang, bagaikan terpenjara dan sangat terbatas. Bahkan, seringkali terjadi pembredelan media massa cetak dengan peristiwa berdarah yang disebut kisruh Malari, 15 Januari 1974. Sedikitnya, ketika itu tercatat selusin media massa cetak mengalami pembredelan atau pencabutan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers). Karena dianggap terlalu kritis terhadap kebijakan pemerintah. Di antaranya: Majalah Tempo, deTIK, dan Editor.

Namun, setelah presiden Soeharto lengser keprabon dan era reformasi mulai bergulir pers dan kebudayaan seakan mulai mendapatkan angin segar dan memasuki babak baru. Bahkan, presiden Habibie—sebagai pengganti Soeharto—melalui Menteri Penerangan, M. Yunus Yosfiah pada tahun 1998 menghapus SIUPP (Surat Izin Penerbitan Pers). Karena dianggap sebagai bentuk kebijakan represif pemerintah terhadap kebebasan pers dan perkembangan kebudayaan. Langkah bijak dan strategis dalam mencapai puncak kebebasan pers itu semakin diperkuat oleh presiden, KH Abdurahman Wahid dengan membubarkan Departemen Penerangan.

Reformasi dan Demokrasi

Kemudian pers mendadak berkembang pesat bagaikan jamur di musim hujan dan ratusan media massa cetak maupun elektronik bermunculan dengan beragam informasi beritanya. Mulai masalah terkait SARA hingga pribadi semakin tumbuh subur sebagai konsumsi masyarakat publik. Di samping itu, beragam perubahan secara perlahan mulai terjadi di tengah masyarakat. Persoalan mulai keagamaan, sosial budaya, sosiologis, historis, politik, hingga gender seakan mendapat angin segar menuju perubahan dan membuka diskursus pluralistik, yang mengarahkan pemberdayaan masyarakat bersifat partisipatif. Karena masyarakat dapat berkreativitas kebudayaan tanpa harus “menghegemoni” kelompok lain yang sangat heterogen, namun saling bersinergis dalam keanekaragaman.

Sayangnya, kebebasan pers kemudian menciptakan “ironi demokratisasi” yang mengakibatkan terjadinya konglomerasi media massa cetak yang hanya berpihak terhadap kepentingan ekspansi dan akumulasi modal segelintir pengusaha. Bahkan, dalam pandangan Agus Sudibyo bahwa kejatuhan presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai akibat dari “ironi demokratisasi” terhadap kebebasan pers yang kebablasan. Menurutnya, media massa cetak terkesan kurang proporsional dalam memberi ruang terbuka terkait pendapat, perspektif, dan klaim yang muncul tentang kepemimpinan Gus Dur.

Hal senada juga diungkapkan oleh, Atmakusumah, yang mengatakan kemunduran citra pers di era tahun 2004, disebabkan oleh empat faktor, yakni: pertama, tekanan fisik dan serangan

terhadap media pers dengan adanya demonstrasi massa di kantor perusahaan pers; kedua, terbunuhnya juru kamera TVRI, Mohamad Jamaluddin, dalam konflik bersenjata di Aceh yang penyebab kematiannya tidak jelas; ketiga, penyanderaan dua wartawan RCTI, Ersya Siregar dan Fery Santoro, oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Fery kemudian dibebaskan, tetapi Ersya tewas dalam tembak-menembak antara GAM dan Tentara Nasional Indonesia; dan keempat, larangan atau hambatan dari pejabat militer bagi wartawan dalam dan luar negeri untuk meliputi wilayah konflik bersenjata di Aceh.

Sementara itu, dalam pengamatan Jakob Oetama menyebutkan bahwa datangnya kebebasan pers hasil reformasi pro-demokrasi serta berlangsungnya revolusi teknologi informasi—yang dipandang justru mengalakkan informasi dan komunikasi tatap muka lewat forum tradisional—memiliki dampak eksistensial, yaitu: kecemasan. Menurutnya, komunikasi sejak semula dipahami bahwa informasi tidak pernah merupakan arus satu arah, melainkan senantiasa dua arah, multiarah yang saling berinteraksi. Akhirnya, kebutuhan komunikasi sebagai ekspresi diri maupun proses komunikasi menjadi sumber pengetahuan yang dikhawatirkan menjadi sumber kecemasan.

Maka itulah, jurnalisme pemaknaan berupa reportase faktual yang memisahkan fakta dan opini yang kini berkembang sebagai reportase interpretasi, reportase interpretasi, reportase yang mendalam, investigatif dan komprehensif menjadi semakin penting. Reportase yang bukan sekedar fakta menurut urutan kejadiannya, bukan fakta secara linier, melainkan fakta yang mencakup latar belakang, proses dan riwayatnya. Dengan cara itu berita bukan sekedar informasi tentang fakta, melainkan sekaligus menyajikan interpretasi akan arti dan makna peristiwa.

Pencarian makna berita serta penyajiannya itulah kemudian menjadi tantangan bagi media massa cetak. Dengan kata lain, subjektivitas menjadi penting atau dalam terminologi Prof De Volder, “obyektivitas yang subyektif”. Subyektif artinya secara serius, secara jujur, secara benar, secara profesional mencoba mencari tahu secara lebih lengkap, mengapa peristiwa itu terjadi dan apa arti serta maknanya. Pemaknaan ini pula

akhirnya menjadi benang merah antara pers dan kajian budaya.

Sebagaimana, pendapat Ahmad Sahal bahwa cultural studies tidak sekedar dekonstruksi dalam budaya dan melumerkan pemisahan antara “budaya tinggi” dan “budaya massa”, melainkan menyambut dan merayakan budaya massa tersebut. Menolak pendapat yang melihat budaya massa sekedar sebagai komoditas kapitalisme yang selalu berdampak homogenisasi, pengulangan dan penyeragaman. Karena dalam praktiknya, orang menerima dan menggunakan budaya massa tidak dengan sikap pasif, melainkan aktif memaknainya dengan kepentingan dan tujuan berbeda-beda. Dengan demikian, jurnalisme pemaknaan semakin relevan untuk diajukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan nilai-nilai (luhur) budaya dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa, yang dalam masa pemerintahan Orde Baru di nilai bias Jawa, sehingga menimbulkan reaksi ketidakpuasan dari kelompok sosial di daerah yang bungkus oleh sikap sentimen etnisitas.

Tumbuhnya pers pada masa reformasi merupakan hal yang menguntungkan bagi masyarakat. Kehadiran pers saat ini dianggap sudah mampu mengisi kekosongan ruang publik yang menjadi celah antara penguasa dan rakyat. Dalam kerangka ini, pers telah memainkan peran sentral dengan memasok dan menyebarluaskan informasi yang diperluaskan untuk penentuan sikap, dan memfasilitasi pembentukan opini publik dalam rangka mencapai konsensus bersama atau mengontrol kekuasaan penyelenggara negara. Peran inilah yang telah dimainkan dengan baik oleh pers. Setidaknya, antusias responden terhadap peran pers dalam mendorong pembentukan

opini publik yang berkaitan dengan persoalan-persoalan bangsa selama ini mencerminkan keberhasilan tersebut.

Melalui perantara media massa cetak, fakta dan aktualitas masyarakat dilembari semangat, komitmen dan keterlibatan dalam berefleksi menemukan solusinya. Sebuah benang merah dari sebuah keyakinan mengenai kebebasan pers yang mencerahkan dan mampu mengembangkan perilaku masyarakat kekinian; zaman globalisasi. Hal ini mengingat kebebasan pers memang menjadi syarat multak, tapi tetap menuntut kemampuan kompetensi pers. Karena, sosok pers dengan mesin serba canggih dalam era globalisasi kekinian bukan sekadar bisnis atau industri semata, melainkan pers adalah pers, yang mengutamakan daya kritis intelektual dan idealisme yang menentukan suara publik, masyarakat dalam artian seluas-luasnya, tapi tetap bertanggungjawab secara hukum positif.

Diplomasi Pers dan Budaya

Dengan adanya kebebasan pers kesadaran masyarakat dalam meningkatkan nilai strategis pengembangan sebuah tradisi berkesenian baik tingkat nasional maupun lokal (daerah) menjadi semakin bertumbuh dan berkembang secara dinamis dan sekaligus kritis. Sehingga terjalin hubungan sinergis antara pers dengan denyut nadi kehidupan seni budaya sebagai daya saing bangsa. Di samping itu, secara evaluatif segala kematangan konsep, gagasan, ide dan sebagainya dari para seniman; pegiat seni budaya dapat membawa kemajuan dan kegairahan masyarakat dalam berkeaktivitas seni dan budaya di ajang seni budaya reguler tahunan, yakni: Pesta Kesenian Bali (PKB).

PKB merupakan sebuah perhelatan seni budaya Bali yang telah berlangsung sejak 1979 hingga sekarang dalam diri masyarakat Bali yang dinamis, kreatif dan transformatif. Kebudayaan Bali telah menjadi salah satu kontributor penting bagi kebudayaan Indonesia dan sering mewakili wajah budaya Indonesia, nilai tradisinya tetap eksis. Namun, kini telah terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat sebagai efek dari interaksi kultur berbagai bangsa di seluruh dunia yang berkunjung ke Bali.

Pers sesuai peran dan tanggungjawabnya sebagai avant garde secara cermat dan kritis melakukan konstruksi terhadap terbangunnya infrastruktur kebudayaan Bali di dalam pelaksanaan PKB. Pers berupa seobjektif mungkin meliputi, dan menyeleksi suatu kejadian dan permasalahan dengan kerangka referensi tertentu, yakni kerangka referensi yang menjadi visi dan editorial policy (kebijakan editorial) dari setiap media cetak Bali. Maka itulah, objektivitas absolut tidak ada dalam pekerjaan pers, melainkan objektivitas yang subyektif. Meski pun demikian pers dengan seksama dan penuh pemahaman, selalu berupa mengikuti perkembangan serta membuat perbandingan antara realitas masyarakat dengan kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan PKB dengan beragam program seni dan budayanya. Namun, demikian seringkali pers hanya mampu melahirkan wacana kritis semata di tengah masyarakat terhadap pelaksanaan PKB, karena seringkali kebijakan yang diterapkan tidak mampu terlaksana dengan baik dalam kenyataannya.

Di samping itu, dengan adanya hegemoni negara (pemerintah) atas etnisitas kebudayaan melalui kebijakan dalam pelaksanaan PKB selama ini telah melahirkan etnisitas budaya premanisme di tengah masyarakat. Bahkan, secara perlahan semakin mengakar dan mendarah daging dengan berlindung di balik kekuasaan dari desa Pakraman. Sehingga, terkesan hegemoni budaya massa semakin melunturkan adiluhung budaya tinggi dalam kesadaran kritis terhadap pelaksanaan PKB, demi pencapaian kesejahteraan.

Karenanya amatlah menarik untuk meninjau–rumusan yang disampaikan dalam laporan Kompas tentang “etnisitas” yang di(re)konstruksikan oleh negara dengan “etnisitas” yang terkonstruksikan akibat dinamika masyarakat sendiri dari generasi ke generasi. Atas dasar itulah, seperti halnya reaksi-reaksi ketidakpuasan kelompok-kelompok masyarakat yang dibungkus oleh sentimen etnisitas melalui media massa terhadap kebudayaan dalam pelaksanaan Pesta Kesenian Bali (PKB) yang sudah diselenggarakan selama 32 tahun menjadi sangat menarik untuk di evaluasi secara holistik dan komperhensif.

Sehingga, pelaksanaan PKB mampu mengungkap korelasi antara teks, konteks, dan realitas dari proses transformasi, partisipasi, dan keterlibatan aktif para pelaku sosial dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan bidang seni budaya, dan media massa cetak Bali secara transparan dan akuntabel, demi mencapai tujuan pembebasan manusia dari keterpinggirannya, sesuai cita-cita peradaban kebudayaan Bali. Selain itu, sebagai upaya konkret kaum intelektual (budayawan, seniman, akademisi, praktisi) dalam memberikan proses pencerahan dan emansipatoris yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi sosial-budaya melalui suatu proses ilmiah yang bersifat damai dan nonkekerasan.

Di samping itu, tentunya untuk meningkatkan hubungan publik yang antipatif dan simpatik dalam upaya membangun kekuasaan yang bersinergis, sehingga memicu tumbuhnya masyarakat dengan karakter kolektif yang santun, damai, dan bermoral. Dalam upaya strategis mencegah pengaruh negatif arus seni budaya global terhadap pola perilaku masyarakat terhadap proses pelestarian dan pengembangan seni budaya baik tradisional, klasik, modern, maupun kontemporer. Sehingga terbangun diplomasi pers dan budaya yang kuat dalam membangun sikap kritis terhadap idialisme antara media massa dengan pemerintah (kekuasaan) bagi pelestarian dan pengembangan seni budaya Bali sebagai pusat kebudayaan dunia.(*)

* Wartawan Radar Bali (Jawa Pos Group), yang juga Karyasiswa Kajian Budaya Unud Denpasar